

Pola Kemitraan pada Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kumuh di Kelurahan Kenjeran Surabaya Timur

Kusumastuti

Staf Pengajar Program Studi D-III Teknik Sipil FTSP. ITS.

email: *kusumastuti@ce.its.ac.id*

ABSTRAK

Pembangunan prasarana dan sarana dasar merupakan salah satu beban yang mengiringi pertumbuhan kota-kota besar termasuk Surabaya. Wilayah Metroplitan Surabaya mengalami pula permasalahan, baik dalam penyediaan maupun pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana /sarana dasar, terutama di lingkungan permukiman kumuh. Hal tersebut telah menjadi perhatian dalam program-program pembangunan perkotaan.

Dalam hal ini kelurahan Kenjeran Surabaya telah menerima bantuan program-program pembangunan perkotaan melalui KIP.(Pelita I,II,III), JPS., KIP. Komprehensif Tahun 1998, 2000, 2002, 2003. Akibat dari bantuan program-program tersebut, masyarakat makin mengandalkan pada bantuan yang disediakan atau mau diberi dengan berbagai kemudahan dari pemerintah. Untuk memperbaiki kendala tersebut diatas, maka diperlukan "Pola Kemitraan", sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam pembangunan lingkungan permukimannya.

Metoda pembahasan yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode "deduksi-teoritik-paradigmatik", yakni dengan mendeduksi "premis-premis kemitraan" yang tertuang didalam dokumen Habitat II dan membawanya ke dataran teoritik dan paradigmatik. Alasan mengenai pentingnya *konsep kemitraan* adalah untuk menjembatani *gap* antara pemerintah dan swasta, dan antara kepentingan komersial dan kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Pola Kemitraan, Prasarana dan Sarana Dasar, Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Sarana dan Prasarana Umum pada dasarnya mudah dijumpai di kelurahan Kenjeran. Angkutan umum seperti bemo juga dapat dipakai untuk menjangkanya. Hal ini memang layak diperhatikan, mengingat angkutan tersebut menghubungkan kota dengan wilayah wisata pantai yang ada di Kenjeran dan sebagai salah satu potensi yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat Kenjeran. Selain itu terdapat sentra perdagangan dan industri kecil.

Permasalahan yang ada di kelurahan Kenjeran adalah :

- Partisipasi dan keterbukaan warga dalam mendiskripsikan permasalahan yang ada masih rendah.
- Kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan masih rendah.
- Terdapat beberapa bantuan program seperti KIP.(Pelita I,II,III), JPS., KIP. Komprehensif Tahun 1998, 2000, 2002, 2003; yang pernah didapatkan warga kelurahan Kenjeran, tetapi dalam pelaksanaannya mayoritas terlambat serta tidak berkelanjutan.

- Koperasi serba Usaha yang bernama Muara Usaha saat ini sudah tidak aktif lagi.

Hal ini perlu diperbaiki, apabila masyarakat diharapkan lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan permukimannya. Pola kemitraan sebenarnya melanjutkan pola yang sudah ada, yaitu yang berasal dari bantuan program-program yang telah diterima di kelurahan Kenjeran, hanya yang perlu diperbaiki adalah *gap* antara kepentingan komersial dan kepentingan masyarakat; hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan mediator, dilihat sebagai hubungan yang rekonsiliatif, karena masing-masing memiliki peran khusus dan tetap dihormati otonominya; setiap individu harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan permukimannya; menghindari komunikasi dari hubungan yang hirarkikal (berjenjang), karena bentuk semacam ini cenderung menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi; harus dilandasi oleh semangat berkontribusi bersama dan tidak dimanipulasi menjadi indoktrinasi dan pemaksaan ide.

2. TUJUAN PENELITIAN

1. Memperbaiki kesenjangan antara kepentingan komersial dan kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih luas didalam pembangunan lingkungan permukiman.
3. Merubah visi masyarakat yang semula dilayani (obyek) menuju ke masyarakat sebagai pelaku (subyek) pembangunan lingkungan permukiman.

3. LANDASAN TEORI

3.1. Konsep Dasar Kemitraan

Konsep kemitraan didalam GSS (*Global Strategy for Shelter*) tahun 1990, secara eksplisit belum dinyatakan didalamnya. Namun indikasi kearah pentingnya konsep tersebut sudah tampak didalam alinea keenam dari *Basic Principles of the GSS*. Enam tahun kemudian konsep kemitraan perlu ditekankan sebagai salah satu konsep unggulan. Penekanan ini tampak pada *Deklarasi Istambul (Habitat II)* nomor 12, didalam bagian dari *Report of United Conference on Human Settlements (UNCHS, 1996:9,13,20)*.

3.2. Tri Bina Plus

Menurut laporan akhir kegiatan (2003:II-11). Tri Bina Plus mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan kondisi fisik lingkungan yang dikembangkan untuk masing-masing kampung ditambah asas integrasi kampung didalam system pembangunan

4. METODE PENELITIAN

4.1. Studi Pendahuluan

Pada tahap studi pendahuluan ini dilakukan studi terhadap data program-program yang pernah dilaksanakan di Kenjeran, seperti KIP.(Kampung Improvement Program), JPS.(Jaring Pengaman Sosial - P3P, P2KP, PDM-DKE), dan KIP.Komprehensif Tahun 1998, 2000, 2002, 2003.

4.2. Populasi dan Sampel

Kesahihan prosedur-prosedur inferensi parametric misalnya bergantung pada bentuk-bentuk fungsi asal sample yang dianalisis. Dalam model-model penelitian yang bersifat probabilitas untuk menerangkan struktur populasi dengan mengasumsi kondisi-kondisi tertentu. Apabila sample dari populasi yang tidak diketahui, maka peneliti harus menggunakan metoda keselarasan untuk menentukan seberapa jauh sample yang diamati sesuai dengan model tertentu yang akan digunakan.

Menurut Kartono (1996:135) untuk populasi 10-100 orang diambil 100%. Mengingat populasi dibawah 100 orang diambil 100%.

4.3. Teknik Pembahasan Masalah

Metoda pembahasan masalah yang digunakan adalah metode "*deduksi-teoritik-paradigmatik*", yakni mendeduksi premis-premis kemitraan yang tertuang didalam Habitat II dan membawanya kedataran teoritik dan paradigmatic, sehingga diperoleh pola kemitraan yang dapat memperbaiki kelemahan dari pola-pola program sebelumnya di kelurahan Kenjeran.

5. GAMBARAN UMUM KELURAHAN KENJERAN

5.1. Wilayah dan Geografis



Sumber : ips.Surabaya plasa com.

PETA LOKASI KELURAHAN KENJERAN

Lokasi kampung kelurahan Kenjeran terletak disebelah Timur Laut kota Surabaya, termasuk dalam wilayah kecamatan Bulak dan juga termasuk dalam wilayah Surabaya Timur.

Adapun luas wilayah kelurahan Kenjeran ± 71,551 Ha. Sebagian besar wilayahnya lahan tambak dan lahan pesisir pantai. Wilayah tersebut dihuni oleh 741 keluarga dan jumlah penduduknya ± 3453 orang. Permukiman di kelurahan Kenjeran terdiri atas Perumahan Real Estate Pantai Mentari dan Perumahan kampung. Perkampungan ada di lokasi wilayah RW 1 s/d Rw 4; sedangkan Perumahan Real Estate Pantai Mentari ada di wilayah RW 5.

Batas administrasi kelurahan Kenjeran adalah :

- Sebelah Utara : Kelurahan Kedung Cowek.
- Sebelah Selatan: Kelurahan Kompleks Kenjeran (AURI).
- Sebelah Timur : Kelurahan Kompleks Kenjeran.
- Sebelah Barat : Kelurahan Sukolilo.

5.2. Kondisi Umum Fisik Kelurahan Kenjeran

a. Aspek Ekonomi :

- Mayoritas masyarakat di wilayah RW 1 s/d RW 4 termasuk golongan menengah ke bawah, sedangkan masyarakat di wilayah RW 5 termasuk golongan menengah ke atas. Jenis pekerjaan penduduknya mayoritas nelayan dan swasta (pedagang).

b. Aspek Sosial :

- Tingkat pendidikan mayoritas lulusan SLTA.
- Tingkat kesehatan cukup baik.
- Kegiatan kampung yang menonjol : kegiatan PKK; Karang Taruna; Kerja bakti; dan Pengajian Bapak-bapak, Ibu-ibu serta Remaja.
- Asal penduduk : mayoritas dari Jawa dan lebih kurang 30% adalah dari Madura.

c. Aspek Budaya :

- Penduduk mayoritas beragama Islam, sering mengadakan pengajian yang terbagi atas kelompok remaja; kelompok ibu-ibu dan kelompok bapak-bapak.

d. Aspek Prasarana dan Sarana :

- Sirkulasi : Penghubung antar wilayah RW ada jalan aspal yang kondisinya tidak baik. Di gang-gang yang ada di RW 1 s/d RW 4 mayoritas dengan lebar jalannya kira-kira 2 meter dilengkapi got (0,3 meter) dikedua sisi gang, yang semuanya sudah diplester (rabat beton) dengan kondisi yang tidak baik.
- Ruang Terbuka : mayoritas masih berwujud tambak-tambak dan pesisir pantai. Ruang terbuka juga ada dilokasi Rekreasi Pantai Kenjeran, yang dimanfaatkan untuk parkir pengunjung.
- Fasilitas Peribadatan : ada 5 masjid dan 10 musholla.
- Fasilitas Olah Raga : lapangan sepak bola.
- Fasilitas Perdagangan : toko penjual kerajinan kerang, kerupuk, ikan asin, ikan bakar, wartel, toko dan warung kopi.
- Ada fasilitas jaringan PDAM, jaringan drainase kota; listrik dan Telkom.
- Fasilitas Kesehatan : ada Puskesmas di Kantor Kelurahan Kenjeran.
- Fasilitas Pendidikan : Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Negeri.
- Fasilitas Perkantoran : ada Balai RW.
- Fasilitas : Pool Sampah; pakir becak.
- Fasilitas Rekreasi : Taman Rekreasi Kenjeran

e. Aspek Lokasi :

- Di lokasi Kelurahan Kenjeran ada fasilitas jalan raya yang dilewati oleh beberapa angkutan umum dengan berbagai tujuan.
- Pencapaian ke lokasi pendidikan, Rumah Sakit, Perdagangan dan fasilitas di pusat kota cukup mudah.

f. Aspek Lingkungan :

- Lingkungan Alam
Kondisi tanahnya datar dan cukup kering. Ruang terbuka hijau sangat kurang. Udara panas dan ada polusi bau amis. Kondisi air tanah kurang baik, sehingga masyarakat cenderung memakai fasilitas air bersih PDAM, karena air sumur sekarang rasanya sudah agak asin dan keruh.

- Lingkungan Buatan
Rumah penduduk mayoritas permanent (96,76%) dan semi permanent (3,24%) dengan kepadatan yang cukup tinggi di beberapa lokasi dan mayoritas kondisi rumah baik eksterior maupun interior kurang baik. Untuk kondisi sekarang rumah penduduk mayoritas tidak mempunyai halaman, sehingga rumah-rumah yang ada saling berhimpitan.

5.3. WILAYAH ADMINISTRASI

Kelurahan Kenjeran terdiri atas 5 RW dan 17 RT, dimana sebagian wilayah RW V adalah wilayah Perumahan Pantai Mentari yang dibangun oleh pengembang. Sedangkan untuk wilayah kampung di RW I,II adalah kampung dengan tipologi khas sebagai kampung nelayan, sedangkan RW III dan IV kebanyakan adalah pendatang yang bermata pencaharian sebagai tukang atau swasta. Wilayah-wilayah RW tersebut terbagi menjadi beberapa RT dengan perincian sebagaimana tersusun dalam table sebagai berikut :

Tabel 5.1. Wilayah Administrasi RW di Kelurahan Kenjeran

RW	RT	JUMLAH
I	1, 2, 3, 4, 5	5
II	1, 2, 3	3
III	1, 2	2
IV	1, 2, 3	3
V	1, 2, 3, 4	4
JUMLAH		17

Sumber : Laporan Akhir Kegiatan KIP Komprehensif-2003

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program-program bantuan yang diberikan pada permukiman kumuh di Kelurahan Kenjeran adalah sebagai berikut :

Tujuan *Program KIP (Pelita I,II)* adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kampung melalui aspek fisik (prasarana dan sarana). Selanjutnya pada *Program KIP (Pelita III) dan JPS*, terjadi peningkatan bantuan; yaitu selain meningkatkan kualitas melalui aspek fisik juga meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Pada *Program KIP Komprehensif (1998, 2000, 2002,2003)*; yaitu merupakan salah satu upaya peningkatan kondisi perumahan dan permukiman kampung, dimana penanganannya dilakukan secara terpadu, baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat dilingkungan perkampungan tersebut. Berdasarkan lingkup kegiatan program yang ditangani, maka juga dilakukan dengan asas "TRI BINA PLUS" yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan yang sudah dikembangkan dengan menjadikan pola pembangunan kampung yang tidak sendiri tetapi sudah diintegrasikan pada system kota. Perbandingan antar bantuan program-program tersebut dapat dilihat pada pada table 6.1 dibawah ini

TABEL 6.1. PERBANDINGAN BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KELURAHAN KENJERAN

PROGRAM	ASAS	SASARAN	PELAKU	KOMPONEN PROGRAM	KELEMBAGAAN
KIP (Pelita I,II)	- Bina Ling - kungan	Masyarakat Berpenghasilan rendah	- Badan Pelaksana Proyek Perbaikan Kampung (BP3K) - Masyarakat - Bank Dunia sebagai penyanggah dana	- Perbaikan fisik lingkungan (prasarana dan sarana)	
KIP (Pelita III)	Tri Bina - Bina Manu - sia - Bina Ling - Kungan - Bina Usaha	Masyarakat menengah Ke bawah	- Badan Pelaksana Pembangunan Program Perbaikan Kampung (Bappem KIP) - Masyarakat - Bank Dunia sebagai penyanggah dana	- Perbaikan fisik lingkungan (prasarana dan sarana) - Pengembangan sumber daya manusia - Pengembangan ekonomi kampung	
JPS	Tri Bina - Bina Manu - sia - Bina Ling - Kungan - Bina Usaha	Masyarakat menengah ke bawah	- Konsultan sebagai pendamping dan monitoring - Masyarakat - Pemerintah sebagai fasilitator - Bank Dunia sebagai penyanggah dana	- Perbaikan fisik lingkungan (prasarana dan sarana) - Pengembangan sumber daya manusia - Pengembangan usaha kecil dan menengah	
KIP Komprehensif Tahun 1998	Tri Bina - Bina Manu - sia - Bina Ling - kungan - Bina Usaha	Masyarakat menengah ke bawah	- Konsultan sebagai pendamping dan monitoring - Masyarakat - Pemerintah sebagai fasilitator - Bank Dunia sebagai penyanggah dana	- Perbaikan fisik lingkungan - Peningkatan kemampuan masyarakat - Manajemen lahan - Peningkatan kualitas rumah	- Yayasan Kampung (YK) - Koperasi Serba Usaha (KSU) - Badan Koordinasi Kelompok Swadaya (BKSW) - Kelompok Swadaya Warga

TABEL 6.1 (lanjutan)
PERBANDINGAN BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KELURAHAN KENJERAN

PROGRAM	ASAS	SASARAN	PELAKU	KOMPONEN PROGRAM	KELEMBAGAAN
KIP Kom - prehensif Tahun 2000	Tri Bina Plus - Bina Manusia - Bina Lingkungan - Bina Usaha - Plasma kota	Masyarakat menengah ke bawah	- Konsultan sebagai pendamping dan monitoring - Masyarakat - Pemerintah kota sebagai fasilitator dan penyanggah dana	- Perbaikan fisik lingkungan (prasarana dan sarana) - Pengembangan sumber daya manusia - Pengembangan usaha kecil dan menengah - Perbaikan rumah	- Yayasan Kampung (YK) - Koperasi Serba Usaha (KSU) - Kelompok Swadaya Warga (KSW)
KIP Kom-prehensif Tahun 2002	Tri Bina Plus - Bina Manusia - Bina Lingkungan - Bina Usaha	Masyarakat menengah ke bawah	- Konsultan sebagai pendamping dan monitoring - Masyarakat - Pemerintah kota sebagai fasilitator dan penyanggah dana	- Perbaikan fisik lingkungan (prasarana dan sarana) - Penghijauan - Pengembangan sumber daya manusia - Pengembangan usaha kecil dan menengah - Perbaikan rumah	- Yayasan Kampung (YK) - Koperasi Serba Usaha (KSU) - Kelompok Swadaya Warga (KSW)
KIP Kom-prehensif Tahun 2003	Tri Bina Plus - Bina Manusia - Bina Lingkungan - Bina Usaha	Masyarakat menengah ke bawah	- Konsultan sebagai pendamping dan monitoring - Masyarakat - Pemerintah kota sebagai Fasilitator dan penyanggah dana	- Perbaikan fisik lingkungan (prasarana dan sarana) - Penghijauan dan Kebersihan lingkungan - Pengembangan usaha kecil dan menengah - Perbaikan rumah	- Yayasan Kampung (YK) - Koperasi Serba Usaha (KSU) - Kelompok Swadaya Warga (KSW)

Sumber : Laporan Akhir Kegiatan KIP.Komprehensif - 2003

6.2. PREMIS-PREMIS KEMITRAAN

Terdapat persamaan tema antara *GSS (Global Strategy for Shelter)* yang disusun pada tahun 1990 di Nairobi, dengan Deklarasi dan Agenda Habitat II yang dirumuskan pada tahun 1996 di Turki.

Konsep *Kemitraan* perlu ditekankan sebagai salah satu konsep unggulan. Penekanan ini pada Deklarasi Istanbul (Habitat II) nomor 12 yang menyatakan :

We adopt the enabling strategy and the principles of partnership and participation

as the most democratic and effective approach for the realization of our commitments. We shall also increase our cooperation with parliamentarians, the private sector, labour unions and non-governmental and other civil society organizations with due respect for their autonomy...(UNCHS, 1996:9).

Dari *Report of United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II)*, bahwa konsep *kemitraan* untuk segera dilaksanakan guna menunjang pembangunan. Pernyataan tersebut termuat didalam mukadimah (preamble) nomor 5 :

...The sooner communities, local governments and partnership among the public, private and community sectors join efforts to create comprehensive, bold and innovative strategies for shelter and human settlements, the better the prospects will be for the safety, health and well-being of people and the brighter the outlook for solutions to global environment and social problems (Ibid, p.13).

Pada bagian lain yang merumuskan tujuan dan prinsip dari operasional mengenai *kemitraan* :

"Partnership among countries and among all actors within countries from public, private, voluntary and community-based organizations, the cooperative sector, non governmental organizations and individuals are assential to the achievement of sustainable human settlements development and the provision of adequate shelter for all and basic services. Partnerships can integrate and mutually support objectives of broad-based participation through, inter alia, forming alliances, pooling resources, sharing knowledge, contributing skills and capitalizing on the comparative advantages of collective actions. The processes can be made more effective by strengthening civil organization and partnership of all sectors of society and among all actors in decision-making processes, as appropriate" (Ibid, p.20).

Apabila kita menyimak premis-premis dan pelaksanaan bantuan-bantuan program diatas, nampak adanya beberapa issue yang perlu mendapatkan perhatian. Issue-issue tersebut adalah :

1. Issue - 1 : "Gap"

Pentingnya konsep *Kemitraan* untuk menjembatani gap antara sector pemerintah dan swasta, dan antara kepentingan komersial dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian memang telah diakui oleh UNCHS (United Nations Conference on Human Settlements), bahwa terdapat gap antara sector-sector pemerintah dan swasta.

2. Issue - 2 : "Hubungan antar Aktor"

Pentingnya hubungan antar-aktor yang ditekankan oleh Habitat II, yakni antara Publik atau pemerintah, Swasta, Masyarakat, dan Mediator, adalah :

- *Voluntary organizations*
- *Community Based Organizations*
- *Cooperative*
- *Non Government Organization*
- *Individuals*

3. Issue - 3 : "Tujuan Esensial"

Adanya tujuan esensial yang ingin dicapai oleh konsep *kemitraan*, yakni : *Adequate shelter for all, and sustainable human settlements.*

4. Issue - 4 : "Komunikasi" dan "Informasi"

Pentingnya komunikasi dan informasi sebagai tulang punggung *kemitraan*

5. Issue - 5 : "Strategi"

Adanya strategi bagi operasionalisasi konsep *kemitraan*, yang berupa :

- *Forming alliances*
- *Pooling resources*
- *Sharing knowledge*
- *Contributing skills, dan*
- *Capitalizing on the comparative advantages of "collective action"*

Kemudian kelima isu tersebut dibawa kedataran paradigmatic, dengan tujuan agar kekuatan dan kelemahan dari kelima

konsep tersebut dapat dibaca secara lebih jernih. Dua paradigma yang akan dipakai untuk membaca kelima konsep tersebut adalah : (1) paradigma *convivialist*, dan (2) paradigma *radicalist*.

Isue - 1 : "Gap"

Menurut kaum *convivialist*, "gap" atau kesenjangan merupakan sesuatu yang alamiah.

Bagi pemerintah, pembangunan untuk masyarakat miskin, merupakan suatu tugas yang tidak dapat dielakkan. Sebaliknya, bagi swasta pembangunan merupakan suatu lahan ekonomi yang menjanjikan keuntungan besar yang cepat diraih, sehingga kelompok sasarannya adalah kelompok elit. Dengan demikian, bagi kaum *convivialist*, komunikasi merupakan infrastruktur yang penting untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan tersebut. Kesenjangan, dapat diatasi melalui rekayasa komunikasi.

Sebaliknya, bagi kaum *radicalist*, kesenjangan merupakan suatu kesengajaan yang dibuat oleh kekuasaan, sehingga hal ini merupakan suatu persoalan structural. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kendali penuh (full control) terhadap pembangunan, agar tidak menjadi ajang spekulasi dan komoditisasi.

Isue - 2 : "Hubungan Antar-Aktor"

Dalam pandangan *radicalist*, hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat cenderung mengikuti pola hierarkis. Pola hubungan yang terjadi adalah bukan *kesetaraan*, melainkan merupakan hubungan antara *superior* dan *inferior*. Bentuk hubungan yang terjadi lebih bersifat *command* dan *instruction*, bahkan kadang-kadang terjadi hubungan yang cenderung *power approach*. Dalam pemahaman ini, pembangunan tidak memihak kepada kepentingan rakyat terbanyak, melainkan memihak kepada kepentingan pemerintah dan komersial.

Sebaliknya, bagi kaum *convivialist*, hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan mediator (NGO, dan sebagainya), dilihat sebagai hubungan

yang rekonsiliatif. Hubungan terjadi karena masing-masing memiliki peran khusus dan masing-masing tetap dihormati otonominya. Di dalam hubungan ini tidak terjadi dominasi satu terhadap lainnya dan semua actor memiliki peran dan sumbangan yang spesifik bagi pembangunan.

Isue - 3 : "Tujuan Esensial"

Tujuan esensial dari agenda Habitat II ada dua, yakni terciptanya : (1) *adequate shelter for all*, dan (2) *sustainable development*.

Di dalam pandangan kaum *radikalis*, konsep *sustainable development* merupakan suatu romantisme dari Negara-negara kapitalis terhadap negara-negara berkembang.

Sedangkan, kaitannya dengan tujuan *adequate shelter for all*, menurut pandangan *radicalist*, karena *layak* disini tidak diukur dari nilai-nilai manusiawi, melainkan diukur dari nilai-nilai ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan alasan keterbatasan keuangan pemerintah.

Sebaliknya, kaum *convivialist* berpandangan, bahwa konsep *sustainable development* merupakan suatu kendaraan dunia yang tidak dapat dielakkan lagi oleh setiap Negara, wilayah, komunitas, maupun individu. Tidak ada satupun individu dapat menghindari dari tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup manusia.

Sedangkan mengenai tujuan *adequate shelter for all*, para *convivialist* berpandangan, karena *layak* memang relative dan kontekstual, maka kondisi *layak* merupakan kondisi yang selalu berubah pada arah yang lebih baik. Dalam situasi keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, maka pengertian *layak* tidak harus semuanya tersedia dan terpenuhi.

Isue - 4 : "Komunikasi" dan "Informasi"

Dalam pandangan kaum *radicalist*, komunikasi mengajak masyarakat menjadi kritis terhadap realita sosial yang ada dihadapan mereka, namun juga kritis terhadap nilai-nilai baru yang mencoba memasuki kehidupan mereka. Dalam

konteks pembangunan perumahan, harus dihindarkan dari segala bentuk komunikasi dan hubungan yang hierarkikal (berjenjang), karena bentuk komunikasi semacam ini cenderung, menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi. Pembangunan perumahan harus diarahkan pada terciptanya suatu lingkungan yang harmonis (komunikatif-hubungan timbal balik), serta mengajarkan prinsip-prinsip kerjasama saling menguntungkan, menghindari bentuk-bentuk komunikasi atau hubungan yang cenderung kompetitif.

Sebaliknya, bagi kaum *convivialist*, komunikasi cenderung lebih dilihat dari kacamata pragmatisme. Komunikasi diterjemahkan kedalam model *social learning* atau belajar bersama. Dalam model ini, masyarakat, pemerintah, swasta, dan mediator (individu, NGO dan sebagainya) belajar bersama-sama. Fokus utama dari *social learning* ini adalah tindakan nyata yang bertujuan oleh suatu kelompok masyarakat.

Isue - 5 : "Strategi"

Dalam pandangan kaum *radicalist*, item-item dari strategi tersebut harus disikapi secara kritis, jangan sampai justru membelenggu gerak dinamis masyarakat yang cenderung mematikan inisiatif masyarakat. Semua item dari strategi tersebut harus memiliki jiwa memihak kepada masyarakat, membawa masyarakat secara emansipatif mencapai tujuannya yang rasional, yakni tujuan yang dirumuskan secara bersama dengan penuh kepehaman dan kesadaran; bukan tujuan yang dimanipulasikan.

Sebaliknya, menurut pandangan kaum *convivialist*, nampaknya item-item dari strategi tersebut lebih cenderung disikapi secara pragmatic, sehingga item-item strategi kemitraan tersebut diatas memang diperlukan untuk memperlancar proses

menghindar dari tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan lingkungan permukiman.

3. Pergeseran posisi pelaku utama dari pemasok (pemerintah dan swasta) ke

pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari program-program bantuan yang telah diberikan masih banyak tantangan yang perlu diperhatikan yaitu tuntutan adanya perubahan visi warga dari dirinya yang semula dilayani (obyek) menuju ke warga sebagai pelaku (subyek) pembangunan dari perbaikan lingkungan permukiman. Jadi kelima issue dari premis-premis kemitraan sangat relevan untuk mengatasi tantangan tersebut diatas, terutama menurut pandangan kaum *convivialist*; adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan dapat diatasi melalui rekayasa komunikasi.
2. Hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan mediator, dilihat sebagai hubungan rekonsiliatif.
3. Bahwa tidak ada satupun individu dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup manusia.
4. Bahwa komunikasi diterjemahkan kedalam model *social learning* atau belajar bersama.
5. Bahwa item-item strategi kemitraan tersebut diatas memang diperlukan untuk memperlancar proses pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

1. Didalam *Pola Kemitraan* kesenjangan dapat diatasi melalui rekayasa komunikasi; yakni hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan mediator, dilihat sebagai hubungan rekonsiliatif.
2. Didalam *Pola Kemitraan*, bahwa masalah lingkungan permukiman tidak berdiri sendiri, melainkan terikat didalam kesadaran pembangunan lingkungan yang lebih luas dan tidak ada satupun individu dapat masyarakat. Hal ini berarti masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dan bagaimana harus dipasok dalam pembangunan lingkungan permukiman.

7.2. SARAN

Agar pola kemitraan dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kedudukan mediator (planner) melibatkan diri secara intens dan belajar bersama-sama masyarakat, pemerintah dan swasta. Planner harus membuat pencingan strategi atau taktik menuju upaya perubahan, tujuannya agar terjadi komunikasi antara planner dan masyarakat untuk memancing permasalahan-permasalahan yang lebih luas lagi yang masih terpendam didalamnya.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 92002), *Kota Surabaya Dalam angka*, BPS.Kota Surabaya.
- Devas, Nick, *"Indonesia's Kampung Improvement Programme An Evaluative Case-Study"*. Development Administration Group, Institute of Local Government Studies, University of Birmingham, 1980.
- Kartono, Kartini (1996), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Penerbit Mandar Maju.
- Laquian, Aprodicio A, *"Whither Site and Services"*. *Habitat International* Vol.2, No.3/4, pp. 291-301, 1977.
- Leeds, A, *"Lower Income Settlement Types: Process, Structures, Policies, in UNCHS: The Residential Circumstances of The Poor In Developing Countries"*, pp. 21-61, New York: Praeger, 1981.
- Pemerintah Kota Surabaya Dinas Tata Kota, *"Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan KIP Komprehensif Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak"*, Tahun 2003.
- Sudaryono, Suryanto, Marsoyo, A, Tjokrosoedarmo, S, Giyarsih, S.M, Riyanto dan Effendi, T.N.(1996), *"Prospek Rumah Sangat Sederhana (RSS) Sebagai Strategi Pemecahan Masalah Perumahan Para Miskin Kota Pada PJP II"*, Laporan Akhir, Riset

